

**IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH  
DALAM LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
(Ditinjau dari PERMENDAGRI No.64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi  
Pemerintah Berbasis Akrual )**

**<sup>1</sup>Yulia Istia Ningsih**

Jurusan Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi – Graha Karya Muara Bulian

E-mail: [yuliestiekg@gmail.com](mailto:yuliestiekg@gmail.com)

**<sup>2</sup>Rati Artarini**

Jurusan Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi – Graha Karya Muara Bulian

### **ABSTRAK**

Penulisan jurnal ini berjudul Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah pada Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari di tinjau dari Permendagri No.64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu dengan membandingkan teori yang berlaku, dalam hal ini Permendagri No.64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dibandingkan dengan penyajian Laporan Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari telah di susun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Batang Hari untuk pencatatan akuntansinya dan penyusunan laporan keuangan belum sesuai dengan Permendagri No.64 Tahun 2013, namun laporan keuangan telah di sajikan tepat waktu sehingga bisa di pergunakan bagi kelompok pengguna laporan keuangan guna pengambilan keputusan.

**Kata Kunci : Standar, Akuntansi, Keuangan, Pemerintah.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan reformasi di bidang akuntansi. Salah satu reformasi yang dilakukan adalah peralihan akuntansi pemerintah yang berbasis kas menjadi basis akrual. Hal ini mengharuskan penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual secara penuh pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Perubahan ini merupakan bagian dari bangunan yang ingin dibentuk dalam reformasi di bidang keuangan negara seperti yang diamanatkan dalam Undang- Undang No. 17 Tahun 2003 yang mengatur tentang keuangan negara. Sehingga basis akrual pada akhirnya akan diterapkan bagi seluruh entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Penerapan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan diharapkan pada tahun 2015 semua laporan keuangan pemerintah telah beralih ke basis akrual secara penuh.

Pemerintah pada tahap pertama telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut masih bersifat sementara karena sebagaimana diamanatkan dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara disebutkan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun kemudian. Oleh karena itu untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut di atas, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2010 untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Perubahan mendasar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah adanya perubahan basis akuntansi yaitu dari basis kas menjadi basis akrual dalam akuntansi pemerintahan. Pada penjelasan PP Nomor 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi Peraturan Berbasis Akrual.

Penerapan basis akrual ini juga sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. Laporan pelaksanaan anggaran meliputi laporan realisasi anggaran (LRA) dan laporan perubahan saldo anggaran lebih/kurang. Sementara itu laporan finansial terdiri dari neraca, laporan operasional (LO), laporan perubahan ekuitas (LPE) serta laporan arus kas (LAK). Disamping itu pemerintah juga harus menyusun catatan atas laporan keuangan (CALK).

Penyajian informasi keuangan pemerintah dengan menggunakan basis akrual akan menjadi informatif, terutama dalam hubungannya dengan pengukuran kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan dalam periode akuntansi tertentu, serta dapat memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah untuk tujuan pengambilan keputusan. Selain itu, laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberikan manfaat yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Batang Hari adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah dan untuk melaksanakan kegiatannya Badan penanggulangan Bencana Daerah menggunakan dana yang berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Berdasarkan Neraca Per 31 Desember 2015 terlihat

Aset sebesar Rp.875.197.346,85, yang terdiri dari Aset lancar sebesar Rp.391.610,00, kas sebesar Rp.0, piutang sebesar Rp.0, Investasi jangka panjang Rp.0, Aset Tetap Rp.826.643.736,85. Aset lainnya Rp.48.162.000,00. sedangkan jumlah pasiva sebesar Rp.2.290.495,00.

Sedangkan pada Laporan Realisasi anggaran per 31 Desember 2015 sebesar Rp.3.156.169.292,00. yang terdiri atas pendapatan Rp.0. sedangkan Belanja sebesar Rp. 3.156.169.292,00, yang terdiri dari belanja Operasi sebesar Rp.2.156.169.292,00, dan belanja modal sebesar Rp.471.145.000,00. Untuk anggaran tahun 2014 sebesar Rp.3.042.927.991,00 yang terdiri atas pendapatan Rp.0. sedangkan belanja sebesar Rp. 3.042.927.991,00. dan belanja modal sebesar Rp.461.439.000,00.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka penulis merumuskan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari.
2. Apakah Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari Sudah Sesuai Dengan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari.
- b. Untuk Mengetahui Penyusunan Laporan Keuangan pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari telah sesuai Dengan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.

## 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 (Pasal 1 ayat 2) defenisi akuntansi yaitu proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya, sementara itu akuntansi ialah proses pengidentifikasian, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang mempergunakan informasi tersebut menurut *American Insitute of Certified Public Accounting (AICPA)*. Akuntansi merupakan Proses mengidentifikasikan, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. *American Accounting Association (Accounting as the process identifiying, measuring, and communicating economic information to permit informed judgements and decisions by users of the information)* (Wilopo, 2005;9). akuntansi yaitu sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Berdasarkan pengertian akuntansi yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi ialah seni dan ilmu dalam proses pengidentifikasian suatu peristiwa ekonomi yang kemudian di lakukan pencatatan, peringkasan dan pelaporan guna mendapatkan suatu informasi untuk pengambilan sebuah keputusan

## 2.2 Manfaat Laporan Keuangan

Menurut SAP yang terdapat dalam Permendagri No. 64 tahun 2013, Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan reformasi yang telah disediakan oleh laporan keuangan, pemakai dapat melakukan pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan organisasi tersebut maupun keputusan lain. Laporan keuangan bagi pemerintah daerah juga memiliki peranan penting, sebab dari laporan keuangan tersebut Pemerintah dapat menilai kinerja organisasi, dan alokasi sumber daya sehingga dapat di jadikan masukan berharga dalam pengambilan keputusan pengembangan organisasi Pemerintah di masa mendatang. Dari sudut pandang ini, maka laporan keuangan memiliki manfaat untuk manajemen organisasi yang dapat memudahkan fungsi perencanaan, fungsi pengelolaan, fungsi pengendalian asset, kewajiban dan Ekuitas dana Pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Dari sisi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan keuangan Pemerintah memberikan informasi mengenai penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan yang dilakukan Pemerintah. Laporan keuangan ini menyajikan perbandingan antara realisasi terhadap anggaran sekaligus prestasi kinerja yang di capai. Dengan informasi ini, pengguna laporan keuangan dapat mengetahui sejauh mana pencapaian yang telah di raih oleh organisasi Pemerintah melalui efiktifitas dan efisiensi belanja yang di hasilkan. Apabila informasi dalam LRA menunjukkan bahwa pada suatu periode tersebut terjadi efiktifitas dan efisiensi belanja, maka hal tersebut akan mendorong pertumbuhan Negara.

Tidak hanya LRA yang dapat menunjukkan efiktifitas dan efisiensi kinerja Pemerintah, laporan keuangan Pemerintah berbentuk neraca memberikan informasi yang tidak kalah pentingnya. Neraca Pemerintah menggambarkan jumlah asset yang di kuasai oleh Pemerintah yang dapat di gunakan untuk melakukan pelayanan umum, dan kewajiban yang menggambarkan jumlah komitmen yang harus di bayar Pemerintah di masa mendatang. Salah satu contohnya adalah dengan mencocokkan belanja modal yang terdapat dalam LRA dengan jumlah asset tetap yang dapat di gunakan untuk memberikan jasa kepada publik, maka dapat diketahui apakah kinerja Pemerintah telah efektif dan efisien dalam memanfaatkan sumber dayanya.

Untuk Laporan Arus Kas (LAK), manfaat yang didapat adalah informasi mengenai keluar masuknya uang dari atau ke kas daerah yang berasal dari aktivitas operasi, investasi non-keuangan, pembiayaan dan non-anggaran. Hasil operasi dapat menjelaskan efisiensi dan efiktifitas dalam satu periode.

Menurut SAP, tujuan dan manfaat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

### **2.3 Kelebihan dan Kelemahan Accrual Basis**

#### **2.3.1 Kelebihan Accrual Basis antara lain :**

- a. Metode accrual basis digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- b. Beban diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya.
- c. Pendapatan diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya walaupun kas belum diterima.
- d. Banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar (sesuai dengan Ketentuan Standar Akuntansi Keuangan dimana mengharuskan suatu perusahaan untuk menggunakan basis akrual).
- e. Piutang yang tidak tertagih tidak akan dihapus secara langsung tetapi akan dihitung kedalam estimasi piutang tak tertagih.
- f. Setiap penerimaan dan pembayaran akan dicatat kedalam masing-masing akun sesuai dengan transaksi yang terjadi.
- g. Adanya peningkatan pendapatan perusahaan karena kas yang belum diterima dapat diakui sebagai pendapatan.
- h. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai pedoman manajemen dalam menentukan kebijakan perusahaan kedepannya.
- i. Adanya pembentukan pencadangan untuk kas yang tidak tertagih, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian.

#### **2.3.2 Kelemahan Accrual Basis**

- a. Metode accrual basis digunakan untuk pencatatan.
- b. Biaya yang belum dibayarkan secara kas, akan dicatat efektif sebagai biaya sehingga dapat mengurangi pendapatan perusahaan.
- c. Adanya resiko pendapatan yang tak tertagih sehingga dapat membuat mengurangi pendapatan perusahaan.
- d. Dengan adanya pembentukan cadangan akan dapat mengurangi pendapatan perusahaan.
- e. Perusahaan tidak mempunyai perkiraan yang tepat kapan kas yang belum dibayarkan oleh pihak lain dapat diterima.

### **2.4 Neraca**

Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun

masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

## 2.5 Laporan Realisasi Anggaran.

Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

## 2.8 Laporan Operasional

Menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

- a. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- b. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

- c. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

## 2.9 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## 2.10 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan /menyajikan /menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi Makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

## 2.11 Penyusunan SAPD

Untuk menyusun SAPD tersebut, perlu memperhatikan beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. Identifikasi prosedur

Tahapan penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah dimulai dari memahami proses bisnis pada pemerintah daerah khususnya terkait siklus pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan siklus itulah tim penyusun SAPD mengidentifikasi prosedur-prosedur apa saja yang harus dibuat.

b. Menentukan pihak-pihak terkait

Setelah prosedur-prosedur teridentifikasi, ditentukan pihak-pihak yang terkait pada masing-masing prosedur. Masing-masing pihak memiliki peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan output yang diinginkan.

c. Menentukan dokumen terkait

Setelah prosedur dan pihak terkait ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dokumen-dokumen yang mengalir pada prosedur sekaligus menentukan pihak-pihak pengguna dokumen tersebut. Dari semua dokumen tersebut diidentifikasi dokumen mana yang *valid* untuk dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan jurnal.

d. Menentukan jurnal standar

Pada setiap prosedur yang telah ditetapkan tim penyusun menelaah SAP dan kebijakan akuntansi terkait. Berdasarkan penelaahan tersebut tim penyusun menentukan jurnal debit dan kredit yang akan digunakan untuk mencatat.

e. Menuangkannya dalam langkah teknis

Langkah terakhir dalam penyusunan SAPD ialah menyusun langkah teknis. Langkah teknis merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi, dokumen apa saja yang diperlukan, dan bagaimana pihak-pihak tersebut memperlakukan dokumen-dokumen yang terkait. Selain itu, diberikan ilustrasi atau format pencatatan dalam bentuk penjurnalan akuntansi pada setiap bagan alur atau transaksi yang membutuhkan pencatatan.

### 3. GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

#### 3.1 Sejarah Umun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga Pemerintahan Non Departement yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana didaerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh badan koordinasi Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008 mengantikan satuan pelaksana penanganan bencana ditingkat kabupaten/kota yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

- a. Waspada dan tanggap terhadap bencana.
- b. Peningkatan pemahaman dan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana.
- c. Membangun sistem penanggulangan bencana.
- d. Peningkatan informasi dan komunikasi yang akurat sesuai dengan kondisi lapangan.
- e. Peningkatan pemantauan pengendalian dan perorganisasian terhadap bencana.
- f. Terintegrasinya rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan bencana secara menyeluruh.

Visi dan misi diatas merupakan acuan untuk menetapkan tujuan, syarat-syarat dan strategi yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### 3.2 Metode Penulisan

##### 3.2.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari :



1. Data Primer yaitu: Data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung kelapangan guna memperoleh atau mengumpulkan keterangan untuk selanjutnya diolah sesuai kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan terdiri dari hasil wawancara berupa tanya jawab langsung dengan PPK-SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari.
2. Data Sekunder yaitu: Data yang telah diolah sehingga menjadi lebih informatif dan langsung dapat dipergunakan. Data sekunder yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini antara lain:
  - a. Sejarah Singkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kabupaten Batang Hari.
  - b. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari.
  - c. Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari tahun 2015.

### **3.2.2 Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat yang mengarah kepada kebenaran diperlakukan dalam pembuktian penelitian ini maka metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

- a. Metode Interview (Wawancara)  
Metode Interview (Wawancara) adalah Metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak terkait yaitu, PPK-SKPD bidang keuangan dan Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari.
- b. Metode Observasi  
Metode Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti guna memperoleh bukti dan prosedur yang ada pada instansi saat melakukan penelitian.

### **3.2.3 Metode Analisis**

- a. Untuk menjawab permasalahan pertama digunakan Metode Deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan, kemudian disusun dan seterusnya diolah sehingga diperoleh dari gambaran dari masalah tersebut.
- b. Sedangkan untuk menjawab permasalahan kedua dipergunakan Metode deduktif, yaitu data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis kembali dengan menggunakan teori-teori yang berlaku sebagai alat analisis yang berguna dalam mengambil suatu kesimpulan

### **3.2.4 Waktu dan Lokasi Praktek Kerja Lapangan (PKL)**

Waktu pelaksanaan Penelitian yaitu dari tanggal 14 Maret 2016 dan berakhir pada tanggal 15 Mei 2016 Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari yang beralamat di Jalan Gajah Mada kel.Rengas Condong Muara Bulian Kabupaten Batang Hari.

## **4. PEMBAHASAN**

### **4.1 Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari merupakan salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah .Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut terdapat Pengeluaran Kas, tetapi tidak terdapat penerimaan kas karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak memperoleh pendapatan.

Dalam menyusun Laporan Keuangan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (PPK-SKPD) membuat Laporan Keuangan berdasarkan bukti-bukti transaksi yang diterima dari Bendahara Pengeluaran yaitu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang sudah disahkan oleh bank, Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran Fungsional, SPJ Fisik berupa Buku Kas Umum (BKU),

Dalam SPJ Pengeluaran Fungsional yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran mengacu pada Buku Kas Umum. Selain itu, pengujian juga dilakukan ke Berita Acara Penutupan Kas dan Register Penutupan Kas dari bendahara Pengeluaran. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Bendahara Pengeluaran tidak menjurnal transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran.

Sebagai contoh, Bendahara Pengeluaran melakukan beberapa transaksi yang dilakukan selama bulan Desember tahun 2015, dan memiliki saldo awal bulan Desember sebesar Rp.33.186.800

1. Pada tanggal 1 Desember 2015 Bendahara Pengeluaran menerima SP2D-LS dengan Nomor Dokumen 06799/SP2D/LS/2015 sebesar Rp.65.392.749 untuk Pembayaran gaji sebesar Rp.47.708.700 dan Tunjangan Keluarga Rp.5.017.830,00 Tunjangan Jabatan Rp.3.420.000 Tunjangan Umum Rp.1.665.000 Tunjangan Beras Rp.3.258.900 Tunjangan PPh/Khusus Rp.1.171.699 pembulatan Gaji Rp.520 iuran asuransi kesehatan Rp.1.581.790 Tunjangan kematian Rp.871.283 Tunjangan Kecelakaan Rp.697.027 dengan LS pada tanggal Desember 2015,
2. Pada tanggal 11 Desember 2015 di terima SP2D-LS dengan Nomor Dokumen 07183/SP2D/LS/2015 oleh Bendahara untuk pengadaan Alat Ukur Lainnya Rp.49.000.000

Berdasarkan transaksi diatas Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan di Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, serta membuat laporan pertanggungjawaban SPJ Fungsional.

Berikut ini Laporan Keuangan yang dihasilkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari:

**Tabel 4.1**  
**Pemerintah kabupaten Batanghari**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Neraca**  
**Per 31 desember 2015**

Uraian	Jumlah(Rp)
<b>Aset</b>	<b>875.197.346,85</b>
<b>Aset lancar</b>	<b>391.610,00</b>
Persediaan	391.610,00
<b>Aset tetap</b>	<b>826.643.736,85</b>
Peralatan dan mesin	983.202.065,00
Gedung dan bangunan	111.117.850,00
Jalan,irigasi dan jaringan	164.481.150,00
Aset tetap lainnya	3.500.000,00
Akumulasi penyusutan	(435.657.328,15)
<b>Aset lainnya</b>	<b>48.162.000,00</b>
Aset lain-lain	48.162.000,00

<b>Jumlah aset</b>	<b>875.197.346,85</b>
<b>Kewajiban</b>	<b>2.290.495,00</b>
<b>Kewajiban jangka pendek</b>	<b>2.290.495,00</b>
Uang belanja	2.290.495,00
<b>Jumlah kewajiban</b>	<b>2.290.495,00</b>
<b>Ekuitas</b>	<b>872.906.851,85</b>
<b>Ekuitas</b>	<b>872.906.851,85</b>
<b>Jumlah ekuitas dana</b>	<b>872.906.851,85</b>
<b>Jumlah kewajiban dan ekuitas</b>	<b>875.197.346,85</b>

*Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

Terlihat pada table 4.1 NERACA pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Batang Hari jumlah Aset sebesar Rp.875.197.346,85 dan jumlah kewajiban Aset sebesar Rp.2.290.495,00 dan jumlah Ekuitas sebesar Rp.872.906.851,85 sehingga jumlah ekuitas di tambah kewajiban sebesar Rp.875.197.346,85.

**Tabel 4.2**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA AERAH**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan daerah	-	-	-
Pendapatan asli daerah	-	-	-
Pendapatan transfer	-	-	-
Lain-lain pendapatan yang sah	-	-	-
Jumlah pendapatan			
Belanja daerah	3.156.169.292,00	3.042.927.991,00	96,41
Belanja operasi	2.685.024.292,00	2.581.488.991,00	96,14
Belanja pegawai	1.395.080.782,00	1.367.645.931,00	98,03
Belanja barang dan jasa	1.289.943.510,00	1.213.843.060,00	94,10
Belanja bunga			
Belanja subsidi			
Belanja hibah			
Belanja bantuan social			
Belanja bantuan keuangan			
Jumlah Belanja operasi	2.685.024.292,00	2.581.488.991,00	96,14
Belanja modal	471.145.000,00	461.439.000,00	97,94
Belanja tidak terduga	-	-	-
Jumlah belanja	3.156.169.292,00	3.042.927.991,00	96,41
Transfer	-	-	-
Surplus/(defisit)	(3.156.169.292,00)	(3.042.927.991,00)	96,41

*Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

Terlihat pada tabel 4.2 mengenai Laporan Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari pada tahun 2015, tidak adanya pendapatan karena untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak memperoleh pendapatan, sedangkan untuk belanja daerah yang terealisasi sebesar Rp.3.042.927.991,00 atau berkisar 96,41% dari

yang dianggarkan. Sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari dapat dikatakan cukup baik dalam merelisasikan dana yang telah dianggarkan.

**Tabel 4.3**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA AERAH**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015**

Pendapatan-LO	-	-
Pendapatan asli daerah Lo	-	-
Pendapatan pajak daerah	-	-
Beban		
Beban pegawai	929.495.931,00	
Beban barang dan jasa	1.652.029.943,00	
Beban penyusutan dan amortisasi	159.067.695,29	
Jumlah beban	2.740.593.569,29	2.740.593.569,29
Surplus/deficit	(2.740.593.569,29)	(2.740.593.569,29)

*Sumber :Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

Terlihat pada tabel 4.3 Mengenai Laporan Operasional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari hanya terdapat jumlah beban Operasi LO sebesar Rp.2.740.593.569,29

**Tabel 4.4**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA AERAH**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER**

<b>URAIAN</b>	<b>2015</b>
EKUITAS AWAL	849.517.250,00
RK-SKPD	3.042.927.991,00
SURPLUS/DEFISIT LO	(2.740593.569,29)
DAMPAK KOMULATIF PERUBAHAN KEWAJIBAN/KESALAHAN MENDASAR	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	(276.589.632,86)
LAIN-LAIN	(2.355.187,00)
<b>JUMLAH EKUITAS AKHIR</b>	<b>872.906.851,85</b>

*Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

Terlihat pada tabel 4.4 Laporan perubahan Ekuitas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari Ekuitas awal sebesar Rp.849.517.250,00 dan untuk ekuitas akhir tahun menjadi Rp.872.906.851,85 disebabkan adanya pengurangan pada Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp.276.589.632,86 sehingga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengalami kenaikan ekuitas.

Dari contoh transaksi tersebut merupakan contoh bendahara belum menerapkan siklus akuntansi yang benar karena transaksi tersebut tidak dilakukan perjurnalan. Dan hanya melakukan system pencatatan single entry terlihat hanya dicatat di sisi penerimaan dan sisi pengeluaran

#### **4.2 Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari sesuai dengan siklus akuntansi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi pemerintah Berbasis AkruaL. SAP Berbasis AkruaL adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruaL, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari menghasilkan Laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan dan Catatan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan contoh transaksi tersebut, PPK-SKPD seharusnya membuat jurnal LO dan LRA atas transaksi selama bulan desember tahun 2015 sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
**Pemerintahan Kabupaten Batang Hari**  
**Jurnal LO**  
**Untuk Bulan Desember tahun 2015**

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6
1/12/2015	06799/SP2D/LS/2015	9.1.1.01.01	Beban Pegawai lo	47.708.700	
		9.1.1.01.02	Beban Tunjangan Keluarga LO	5.017.830	
		9.1.1.01.03	Beban Tunjangan Jabatan	3.420.000	
		9.1.1.01.05	Beban Tunjangan Umum LO	1.665.000	
		9.1.1.01.06	Beban Tunjangan Beras LO	3.258.900	
		9.1.1.01.07	Beban Tunjangan PPh/Khusus LO	1.171.699	
		9.1.1.01.08	Beban Pembulatan Gaji LO	520	
		9.1.1.01.09	Beban Iuran Asuransi kesehatan LO	1.581.790	
		9.1.1.01.23	Beban Tunjangan Kecelakaan LO	697.027	
		9.1.1.01.24	Beban Tunjangan kematian LO	871.283	
		3.1.3.01.01	_RK PPKD		65.392.749
			(Pembayaran gaji dan tunjangan)		
11/12/2015	07183/SP2D/LS/2015	9.1.2.06.02	Beban Alat Ukur	49.000.000	
		3.1.3.01.01	_Rk PPKD		49.000.000
			(Pembayaran alat ukur)		

*Sumber : Diolah oleh penulis*

**Tabel 4.6**  
**Pemerintahan Kabupaten Batang Hari**  
**Jurnal LRA**  
**Untuk Bulan Desember tahun 2015**

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6
1/12/2015	06799/SP2D/LS/2015	5.1.1.01.01	Belanja Pegawai	47.708.700	
		5.1.1.01.01	Tunjangan Keluarga	5.017.830	
		5.1.1.01.01	Tunjangan Jabatan	3.420.000	
		5.1.1.01.01	Tunjangan Umum	1.665.000	
		5.1.1.01.01	Tunjangan Beras	3.258.900	
		5.1.1.01.01	Tunjangan PPh/Khusus	1.171.699	

		5.1.1.01.01	Pembulatan Gaji	520	
		5.1.1.01.01	Iuran Asuransi kesehatan	1.581.790	
		5.1.1.01.01	Tunjangan Kecelakaan	697.027	
		5.1.1.01.01	Tunjangan kematian	871.283	
		3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL (Pembayaran gaji dan tunjangan)		65.392.749
11/12/2015	07183/SP2D/LS/2015	5.1.2.06.02	Belanja Alat Ukur	49.000.000	
		2.1.5.02.06	Estimasi Perubahan SAL (Padda saat Pembelian Alat Ukur)		49.000.000

*Sumber : Diolah oleh penulis*

Jika transaksi yang telah di jurnal selesai maka diposting ke buku besar, untuk memilah per akun yang sama. Dan terlihat dibawah ini pencatatan Buku Besar, sebagai berikut

**Tabel 4.7**  
**BUKU BESAR**

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Batang Hari  
Kode Rekening : 9.1.1.01.01  
Nama Rekening : Beban Pegawai LO

Tanggal/ Bulan	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1/12/2015	Beban Pegawai LO	JU.1	47.708.700		47.708.700

*Sumber : Diolah oleh penulis*

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Batang Hari  
Kode Rekening : 9.1.1.01.02  
Nama Rekening : Beban Tunjangan Keluarga LO

Tanggal/ Bulan	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
01-12-2015	Beban Tunjangan Keluarga LO	JU.1	5.017.830		5.017.830

*Sumber : Diolah oleh penulis*

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Batang Hari  
Kode Rekening : 9.1.1.01.03  
Nama Rekening : Beban Tunjangan Jabatan LO

Tanggal/ Bulan	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
01-12-2015	Beban Tunjangan Jabatan LO	JU.1	3.420.000		3.420.000

*Sumber : Diolah oleh penulis*

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Batang Hari  
Kode Rekening : 9.1.1.01.05  
Nama Rekening : Beban Tunjangan Umum LO

Tanggal/ Bulan	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
01-12-2015	Beban Tunjangan Umum LO	JU.1	1.665.000		1.665.000

Sumber : Diolah oleh penulis

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Batang Hari  
 Kode Rekening : 9.1.1.01.06  
 Nama Rekening : Beban Tunjangan Beras LO

Tanggal/ Bulan	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
01-12-2015	Beban Tunjangan Beras LO	JU.1	3.258.900		3.258.900

Sumber : Diolah oleh penulis

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Batang Hari  
 Kode Rekening : 9.1.1.01.07  
 Nama Rekening : Beban Tunjangan PPh/Khusus LO

Tanggal/ Bulan	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
01-12-2015	Beban Tunjangan PPh/Khusus LO	JU.1	1.171.699		1.171.699

Sumber : Diolah oleh penulis

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Batang Hari  
 Kode Rekening : 9.1.1.01.08  
 Nama Rekening : Beban Pembulatan Gaji LO

Tanggal/ Bulan	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
01-12-2015	Beban Pembulatan Gaji LO	JU.1	520		520

Sumber : Diolah oleh penulis

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Batang Hari  
 Kode Rekening : 9.1.1.01.09  
 Nama Rekening : Beban Iuran Asuransi kesehatan LO

Tanggal/ Bulan	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
01-12-2015	Beban Iuran Asuransi kesehatan LO	JU.1	1.581.790		1.581.790

Sumber : Diolah oleh penulis

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Batang Hari  
 Kode Rekening : 9.1.1.01.23  
 Nama Rekening : Beban Tunjangan Kecelakaan LO

Tanggal/ Bulan	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
01-12-2015	Beban Tunjangan Kecelakaan LO	JU.1	697.027		697.027

Sumber : Diolah oleh penulis

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Batang Hari  
 Kode Rekening : 9.1.1.01.24  
 Nama Rekening : Beban Tunjangan kematian LO

Tanggal/ Bulan	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
01-12-2015	Beban Tunjangan kematian LO	JU.1	871.283		871.283

*Sumber : Diolah oleh penulis*

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Batang Hari  
 Kode Rekening : 3.1.3.01.01  
 Nama Rekening : RK PPKD

Tanggal/ Bulan	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
01-12-2015	RK PPKD	JU.1		65.392.749	65.392.749
11-12-2015	RK PPKD	JU.2		49.000.000	114392749

*Sumber : Diolah oleh penulis*

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Batang Hari  
 Kode Rekening : 9.1.2.06.02  
 Nama Rekening : Beban Alat Ukur

Tanggal/ Bulan	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
01-12-2015	Beban Alat Ukur	JU.1	49.000.000		49.000.000

*Sumber : Diolah oleh penulis*

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Batang Hari  
 Kode Rekening : 5.1.1.01.01  
 Nama Rekening : Belanja Pegawai

Tanggal/ Bulan	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1/12/2015	Belanja Pegawai	JU.2	47.708.700		47.708.700

*Sumber : Diolah oleh penulis*

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Batang Hari  
 Kode Rekening : 5.1.1.01.02  
 Nama Rekening : Belanja Tunjangan Keluarga

Tanggal/ Bulan	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1/12/2015	Belanja Tunjangan Keluarga	JU.2	5.017.830		5.017.830

*Sumber : Diolah oleh penulis*

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Batang Hari  
 Kode Rekening : 5.1.1.01.03  
 Nama Rekening : Belanja Tunjangan Jabatan

Tanggal/ Bulan	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
-------------------	--------	-----	------------	-------------	-------



1/12/2015	Belanja Tunjangan Jabatan	JU.2	3.420.000		3.420.000
-----------	------------------------------	------	-----------	--	-----------

*Sumber : Diolah oleh penulis*

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Batang Hari  
 Kode Rekening : 5.1.1.01.05  
 Nama Rekening : Belanja Tunjangan Umum

Tanggal/ Bulan	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1/12/2015	Belanja Tunjangan Umum	JU.2	1.665.000		1.665.000

*Sumber : Diolah oleh penulis*

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Batang Hari  
 Kode Rekening : 5.1.1.01.06  
 Nama Rekening : Belanja Tunjangan Beras

Tanggal/ Bulan	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1/12/2015	Belanja Tunjangan Beras	JU.2	3.258.900		3.258.900

*Sumber : Diolah oleh penulis*

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Batang Hari  
 Kode Rekening : 5.1.1.01.07  
 Nama Rekening : Belanja Tunjangan PPh/Khusus

Tanggal/ Bulan	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1/12/2015	Belanja Tunjangan PPh/Khusus	JU.2	1.171.699		1.171.699

*Sumber : Diolah oleh penulis*

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Batang Hari  
 Kode Rekening : 5.1.1.01.08  
 Nama Rekening : Belanja Pembulatan Gaji

Tanggal/ Bulan	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1/12/2015	Belanja Pembulatan Gaji	JU.2	520		520

*Sumber : Diolah oleh penulis*

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Batang Hari  
 Kode Rekening : 5.1.1.01.09  
 Nama Rekening : Belanja Iuran Asuransi kesehatan

Tanggal/ Bulan	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1/12/2015	Belanja Iuran Asuransi kesehatan	JU.2	1.581.790		47.708.700

*Sumber : Diolah oleh penulis*

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Batang Hari  
 Kode Rekening : 5.1.1.01.23  
 Nama Rekening : Belanja Tunjangan Kecelakaan

Tanggal/ Bulan	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1/12/2015	Belanja Tunjangan Kecelakaan	JU.2	697.027		697.027

Sumber : Diolah oleh penulis

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Batang Hari

Kode Rekening : 5.1.1.01.24

Nama Rekening : Belanja Tunjangan kematian

Tanggal/ Bulan	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1/12/2015	Belanja Tunjangan kematian	JU.2	871.283		871.283

Sumber : Diolah oleh penulis

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Batang Hari

Kode Rekening : 3.1.2.05.01

Nama Rekening : Estimasi Perubahan SAL

Tanggal/ Bulan	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1/12/2015	Estimasi Perubahan SAL	JU.2		65.392.749	65.392.749
3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL	JU.2		49.000.000	114.392.749

Sumber : Diolah oleh penulis

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Batang Hari

Kode Rekening : 5.1.2.06.02

Nama Rekening : Belanja Alat Ukur

Tanggal/ Bulan	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1/12/2015	Belanja Alat Ukur	JU.2	49.000.000		49.000.000

Sumber : Diolah oleh penulis

Setelah jurnal diposting ke Buku Besar maka langkah selanjutnya menyusun Neraca Saldo sebagai berikut :

**Tabel 4.8**  
**Pemerintahan Kabupaten Batang Hari**  
**Neraca Saldo**  
**Untuk akhir 30 April 2016**

Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1	2	3	4
5.1.1.01.01	Belanja Pegawai	47.708.700	
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga	5.017.830	
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan	3.420.000	
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Umum	1.665.000	
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras	3.258.900	
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Khusus	1.171.699	
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji	520	
5.1.1.01.09	Belanja Iuran Asuransi kesehatan	1.581.790	

5.1.1.01.23	Belanja Tunjangan Kecelakaan	697.027	
5.1.1.01.24	Belanja Tunjangan kematian	871.283	
3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL		114.392.749
5.1.2.06.02	Belanja Alat Ukur	49.000.000	
9.1.1.01.01	Beban Pegawai LO	47.708.700	
9.1.1.01.02	Beban Tunjangan Keluarga LO	5.017.830	
9.1.1.01.03	Beban Tunjangan Jabatan	3.420.000	
9.1.1.01.05	Beban Tunjangan Umum LO	1.665.000	
9.1.1.01.06	Beban Tunjangan Beras LO	3.258.900	
9.1.1.01.07	Beban Tunjangan PPh/Khusus LO	1.171.699	
9.1.1.01.08	Beban Pembulatan Gaji LO	520	
9.1.1.01.09	Beban Iuran Asuransi kesehatan LO	1.581.790	
9.1.1.01.23	Beban Tunjangan Kecelakaan LO	697.027	
9.1.1.01.24	Beban Tunjangan kematian LO	871.283	
3.1.3.01.01	RK PPKD		114.392.749
9.1.2.06.02	Beban Alat Ukur	49.000.000	
Jumlah		<b>228.785.498</b>	<b>228.785.498</b>

*Sumber : Diolah oleh penulis*

Sesuai dengan siklus akuntansi, setelah penyusunan neraca saldo maka dapat menyusun laporan-laporan keuangan dengan mengambil data dari neraca saldo. Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah haruslah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual yang dimana sesuai dengan siklus akuntansi. Sedangkan system pencatatan menggunakan *double-entry*, dan menghasilkan laporan keuangan yang baik. Berikut ini Laporan Keuangan yang dihasilkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari:

**Tabel 4.9**  
**Pemerintah kabupaten Batanghari**  
**Badan Penaggulangan Bencana Daerah**  
**Neraca**  
**Per 31 Desember 2015**

Uraian	Jumlah(Rp)
<b>Aset</b>	<b>875.197.346,85</b>
<b>Aset lancar</b>	<b>391.610,00</b>
Persediaan	391.610,00
<b>Aset tetap</b>	<b>826.643.736,85</b>
Peralatan dan mesin	983.202.065,00
Gedung dan bangunan	111.117.850,00
Jalan,irigasi dan jaringan	164.481.150,00
Aset tetap lainnya	3.500.000,00
Akumulasi penyusutan	(435.657.328,15)
<b>Aset lainnya</b>	<b>48.162.000,00</b>
Aset lain-lain	48.162.000,00
<b>Jumlah asset</b>	<b>875.197.346,85</b>
<b>Kewajiban</b>	<b>2.290.495,00</b>
<b>Kewajiban jangka pendek</b>	<b>2.290.495,00</b>
Uang belanja	2.290.495,00

<b>Jumlah kewajiban</b>	<b>2.290.495,00</b>
<b>Ekuitas</b>	<b>872.906.851,85</b>
<b>Ekuitas</b>	<b>872.906.851,85</b>
<b>Jumlah ekuitas dana</b>	<b>872.906.851,85</b>
<b>Jumlah kewajiban dan ekuitas</b>	<b>875.197.346,85</b>

*Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

Terlihat pada table 4.9 Neraca pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Batang Hari jumlah Aset sebesar Rp.875.197.346,85 dan jumlah kewajiban Aset sebesar Rp.2.290.495,00 dan jumlah Ekuitas sebesar Rp.872.906.851,85 sehingga jumlah ekuitas di tambah kewajiban sebesar Rp.875.197.346,85.

**Tabel 4.10**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA AERAH**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan daerah	-	-	-
Pendapatan asli daerah	-	-	-
Pendapatan transfer	-	-	-
Lain-lain pendapatan yang sah	-	-	-
Jumlah pendapatan			
Belanja daerah	3.156.169.292,00	3.042.927.991,00	96,41
Belanja operasi	2.685.024.292,00	2.581.488.991,00	96,14
Belanja pegawai	1.395.080.782,00	1.367.645.931,00	98,03
Belanja barang dan jasa	1.289.943.510,00	1.213.843.060,00	94,10
Belanja bunga			
Belanja subsidi			
Belanja hibah			
Belanja bantuan social			
Belanja bantuan keuangan			
Jumlah Belanja operasi	2.685.024.292,00	2.581.488.991,00	96,14
Belanja modal	471.145.000,00	461.439.000,00	97,94
Belanja tidak terduga	-	-	-
Jumlah belanja	3.156.169.292,00	3.042.927.991,00	96,41
Transfer	-	-	-
Surplus/(defisit)	(3.156.169.292,00)	(3.042.927.991,00)	96,41

*Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

Terlihat pada table 4.10 mengenai Laporan Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari pada tahun 2015, tidak adanya pendapatan karena untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak memperoleh pendapatan, sedangkan untuk belanja daerah yang terealisasi sebesar Rp.3.042.927.991,00 atau berkisar 96,41% dari yang dianggarkan. Sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari dapat dikatakan cukup baik dalam merelisasikan dana yang telah dianggarkan.

**Tabel 4.11**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA AERAH  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015**

Pendapatan-LO	-	-
Pendapatan asli daerah Lo	-	-
Pendapatan pajak daerah	-	-
Beban		
Beban pegawai	929.495.931,00	
Beban barang dan jasa	1.652.029.943,00	
Beban penyusutan dan amortisasi	159.067.695,29	
Jumlah beban	2.740.593.569,29	2.740.593.569,29
Surplus/deficit	(2.740.593.569,29)	(2.740.593.569,29)

*Sumber :Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

Terlihat pada tabel 4.11 Mengenai Laporan Operasional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari hanya terdapat jumlah beban Operasi LO sebesar Rp.2.740.593.569,29

**Tabel 4.12  
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA AERAH  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER**

URAIAN	2015
EKUITAS AWAL	849.517.250,00
RK-SKPD	3.042.927.991,00
SURPLUS/DEFISIT LO	(2.740593.569,29)
DAMPAK KOMULATIF PERUBAHAN KEWAJIBAN/KESALAHAN MENDASAR	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	(276.589.632,86)
LAIN-LAIN	(2.355.187,00)
<b>JUMLAH EKUITAS AKHIR</b>	<b>872.906.851,85</b>

*Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

Terlihat pada tabel 4.14 Laporan perubahan Ekuitas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari Ekuitas awal sebesar Rp.849.517.250,00 dan untuk ekuitas akhir tahun menjadi Rp.872.906.851,85 disebabkan adanya pengurangan pada Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp.276.589.632,86 sehingga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengalami kenaikan ekuitas. Berdasarkan PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah penilaian kembali/revaluasi aset tetap tidak di perkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Mengenai penyimpangan Selisih Revaluasi aset tetap merupakan Akumulasi penyusutan tahun 2014 yang disajikan ulang per tanggal 1 januari 2015 sebesar Rp.276.589.632,86 dengan rincian: akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp.275.708.382, akumulasi penyusutan, irigasi dan jaringan sebesar Rp.881.250 dan selisih antara revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana pada akun diinvestasikan pada aset tetap.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

1. Proses penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari dilakukan belum sesuai dengan siklus Akuntansi yang sebenarnya,

karena masih menggunakan pencatatan single entry hal ini terlihat dalam pencatatannya hanya dilakukan di sisi penerimaan dan sisi pengeluaran.

2. Penyusunan laporan keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari belum sesuai dengan siklus akuntansi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 hal ini terlihat dalam setiap transaksi tidak dilakukan penjurnalan.

## **5.2 Saran**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari hendaknya lebih lengkap dalam mencatat jurnal setiap melakukan transaksi, serta mengupayakan agar sesuai dengan siklus Akuntansi yang berlaku. Serta seharusnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari dapat mewujudkan transparansi Laporan Keuangan kepada pihak yang memerlukan.